



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERAN PUIC DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN DUNIA ISLAM

Ziyad Falahi

Analisis Legislatif Ahli Muda

ziyad.falahi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

The Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) baru saja menyelenggarakan konferensi ke-19 pada 12-15 Mei 2025, di Jakarta. Pertemuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) ke-19 tersebut diawali dengan pembukaan konferensi dengan *53rd Meeting of the Executive Committee*. Rapat perdana dalam rangkaian PUIC dipimpin oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Mardani Ali Sera. Mardani Ali Sera menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berada di garis depan dalam memperjuangkan perdamaian global, termasuk menyuarakan dukungan penuh terhadap negara Timur Tengah yang tengah menghadapi agresi Israel. Indonesia siap mengusung Deklarasi Jakarta sebagai hasil PUIC yang diumumkan pada Kamis, 14 Mei 2025.

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan telah beberapa kali menjadi tuan rumah konferensi penting PUIC, termasuk sidang ke-7 di Palembang tahun 2012 dan Komite Eksekutif PUIC di Jakarta tahun 2003. Presiden Prabowo yang hadir dan membuka Konferensi PUIC 2025, menekankan bahwa organisasi Islam makin relevan di tengah dunia yang mengalami ketegangan geopolitik sehingga dapat menjadi kanal utama dalam mengatasi berbagai tantangan global. Implikasinya, PUIC dapat menjadi representasi termutakhir dalam upaya peningkatan peran parlemen perempuan di tengah perang yang acap kali mengorbankan ibu dan anak.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memimpin sidang komite umum (*general committee*) dalam acara bertemakan "*Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience*". Puan Maharani memperkirakan jumlah populasi muslim berkisar 25 persen dari total umat manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Statuta PUIC, Puan memandang Islam merupakan kekuatan pluralisme yang mampu menciptakan banyak para ilmuwan dan filsuf. Puan secara langsung memuji keberhasilan Parlemen Pantai Gading yang memegang keketuaan PUIC tahun 2024, khususnya sang ketua, Adama Bictogo yang memegang tongkat Presidensi PUIC ke-18 dalam sidang 26th Session of the PUIC General Committee.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PUIC, Mouhamed Khouraiichi Niass, dalam forum menyerukan pembentukan dana internasional untuk membantu lebih dari 40.000 anak yatim di Gaza yang menjadi korban agresi, termasuk penyediaan bantuan bagi anak-anak yang kehilangan anggota tubuh. Sidang yang terdiri dari delegasi anggota negara OKI tersebut memutuskan memilih anggota Parlemen Pantai Gading, Maimouna Epsé Touré (Kelompok Afrika), dan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf (Kelompok Arab), sebagai dua Wakil Ketua PUIC yang mendampingi Puan yang terpilih sebagai Presiden ke-19 PUIC. Sementara Wakil Ketua BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri, dipilih untuk menjadi *Rapporteur*.

Pada sesi berikutnya, Puan memimpin pengesahan agenda dan program kerja Pertemuan ke-19 Konferensi PUIC. Agenda sidang dilanjutkan dengan *speech* dari masing-masing ketua dan wakil ketua parlemen negara OKI yang hadir, seperti Ketua Majelis Shura Arab Saudi Abdullah

bin Mohammed bin Ibrahim Al Sheikh, Ketua Parlemen Aljazair Ibrahim Boughali, Ketua Parlemen Bahrain Ahmed Al Musallam, dan Ketua Parlemen Burkina Faso Bougouma Ousmane. Kemudian, Ketua Parlemen Pantai Gading Adama Bictogo, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Malaysia Tan Sri Dato Johari Bin Abdul, Ketua Parlemen Oman Khalid Hilal Nasser Al Maawali, dan Presiden Parlemen Arab Mohamed Ahmed Alyammahi. Sebagian negara diwakili oleh Wakil Ketua Parlemen.

Atensi DPR

Berdasarkan pidato yang disampaikan pada sesi penutupan, Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan komitmen Indonesia untuk mengawal tindak lanjut dalam mengimplementasi hasil pertemuan PUIC. Oleh karena itu, Komisi I dan BKSAP DPR RI berkesempatan lebih lanjut menggali dukungan dalam bentuk diplomasi parlemen bercirikan *multitrack* guna merespons dana internasional sebagaimana amanah Sekjen Parlemen OKI. Terlebih, Deklarasi Jakarta yang telah dirilis mampu menempatkan urgensi pertemuan PUIC setara dengan agenda eksekutif untuk menjaga perdamaian abadi, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI perlu mengawal kebijakan luar negeri RI dalam memperjuangkan kepentingan dunia Islam sesuai Deklarasi Jakarta yang dihasilkan Konferensi PUIC ke 19 tersebut.

Sumber

antaranews.com, 15 Mei 2025;
emedia.dpr.go.id, 15 Mei 2025; dan
presiden.go.id, 14 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*